

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

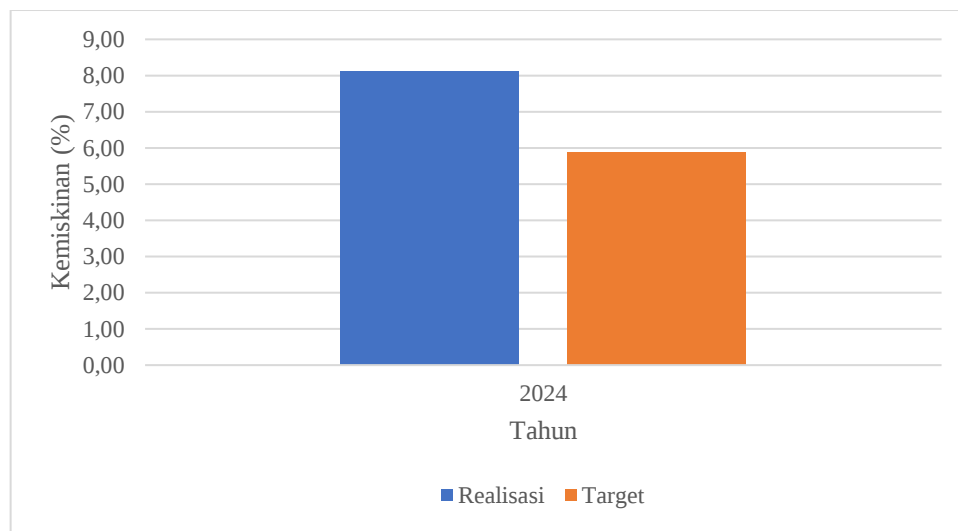
Kemiskinan merupakan masalah utama di banyak negara termasuk Indonesia. Walaupun telah menjalankan berbagai cara, penanggulangan kemiskinan tetap menjadi tujuan utama pembangunan nasional dan internasional. Menurut *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, tujuan pokok pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu memberantas segala jenis kemiskinan di seluruh dunia (Badan Pusat Statistik, 2024a).

Di samping itu, kemiskinan menjadi bagian dari masalah rumit yang didorong oleh keterkaitan beberapa faktor serta isu yang kompleks di berbagai negara. Kemiskinan digambarkan sebagai kondisi yang tidak hanya ditandai oleh pendapatan rendah tetapi juga oleh terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, dan kesempatan untuk ikut serta dalam aktivitas ekonomi yang bermanfaat lainnya. Kemiskinan termasuk hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh negara. Hal ini berarti bahwa kemiskinan menjadi isu utama secara global termasuk negara Indonesia (Rossa & Ananda, 2024).

Setiap negara berkembang termasuk Indonesia, menghadapi kesulitan kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi masalah, dengan seiring berjalannya waktu dan membutuhkan solusi yang menyeluruh. Indonesia adalah negara kepulauan dengan keadaan yang berbeda di setiap pulau. Perbedaan kondisi ini dapat

menyebabkan keterbelakangan di suatu wilayah karena pembangunan yang terbatas, sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan (Gunawan dkk., 2024).

Berikut disajikan perbandingan realisasi dan target tingkat kemiskinan di Pulau Jawa:

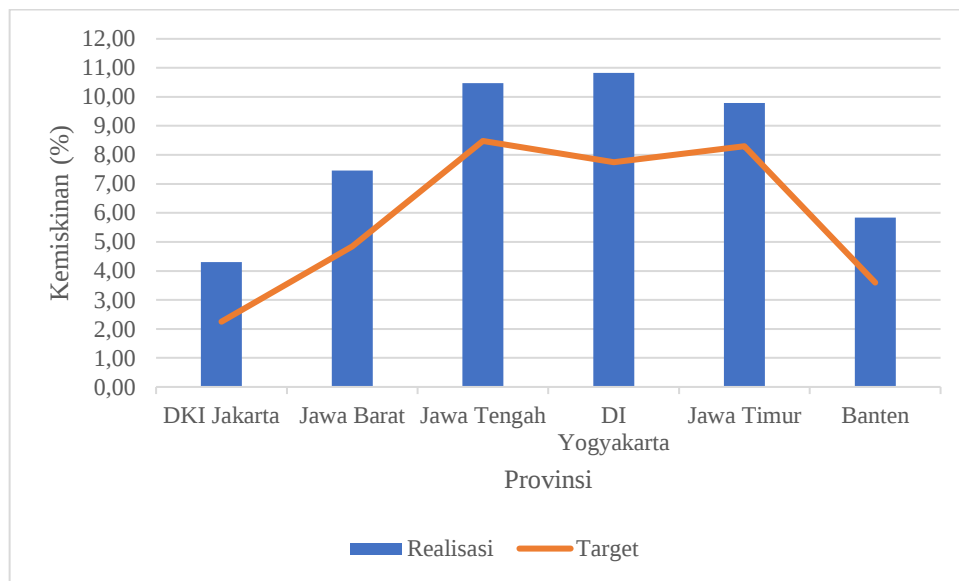


Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik 2025 dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 (diolah kembali)

Gambar 1. 1
Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa
Tahun 2024 (%)

Berdasarkan diagram di atas, target kemiskinan di Pulau Jawa yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 5,87%, namun realisasi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2024 sebesar 8,12%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian realisasi kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2024 masih belum memenuhi target yang telah ditentukan.

Jika dilihat berdasarkan provinsi di Pulau Jawa, berikut disajikan diagram perbandingan realisasi dan target tingkat kemiskinan:



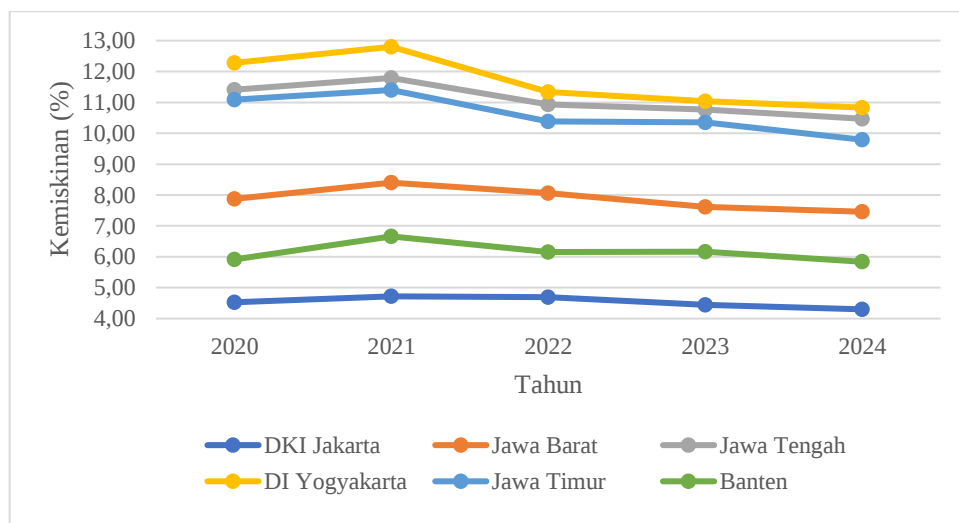
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik 2025 dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2019 (diolah kembali)

Gambar 1. 2
Perbandingan Realisasi dan Target Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2024 (%)

Berdasarkan diagram tersebut, terlihat adanya perbedaan antara target penurunan kemiskinan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan realisasi tingkat kemiskinan pada setiap provinsi di Pulau Jawa. Pada tahun 2024, seluruh provinsi di Pulau Jawa masih mencatat angka kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditentukan. Seperti, Provinsi DKI Jakarta memiliki target sebesar 2,25%, tetapi realisasi sebesar 4,3%. Provinsi Jawa Barat menetapkan target sebesar 4,85%, namun realisasi sebesar 7,46%. Di Provinsi Jawa Tengah target kemiskinan sebesar 8,48%, tetapi realisasi sebesar 10,47%. Selain itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki target sebesar 7,75%, namun realisasi tercatat sebesar

10,83%. Provinsi Jawa Timur menetapkan target sebesar 8,3%, tetapi realisasi sebesar 9,79%. Provinsi Banten memiliki target sebesar 3,6%, tetapi realisasi tercatat sebesar 5,84%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan setiap provinsi di Pulau Jawa belum terlaksana secara optimal.

Selain itu, diagram persentase kemiskinan menurut provinsi di Pulau Jawa sebagai berikut:



Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik 2025 (diolah kembali)

Gambar 1. 3

Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (%)

Berdasarkan diagram di atas, menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi yang cukup signifikan di Pulau Jawa periode 2020-2024. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara konsisten berada pada posisi pertama sebagai wilayah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Kemudian, posisi kedua tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah, dan diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga. Sementara itu, tingkat kemiskinan terendah tercatat di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, urutan

kedua terendah berada di Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan persentase kemiskinan terendah ketiga di Pulau Jawa.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya ketimpangan pembangunan antarprovinsi di Pulau Jawa yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi meskipun kawasan tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Peningkatan pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa juga tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, sehingga menyulitkan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan (Angelia & Anitasari, 2025).

Sejalan dengan kondisi tersebut, teori kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen, menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan kemampuan individu dalam mengakses berbagai peluang untuk berkembang. Sen mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya kebebasan untuk menjalani kehidupan yang bermakna bagi mereka. Oleh karena itu, kebijakan pengurangan kemiskinan harus memprioritaskan peningkatan akses terhadap pendidikan, serta kesempatan ekonomi (Dzakiyyah & Utomo, 2025).

Dengan demikian, belum tercapainya target tingkat kemiskinan sesuai RPJMN, serta adanya perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi di Pulau Jawa menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan belum

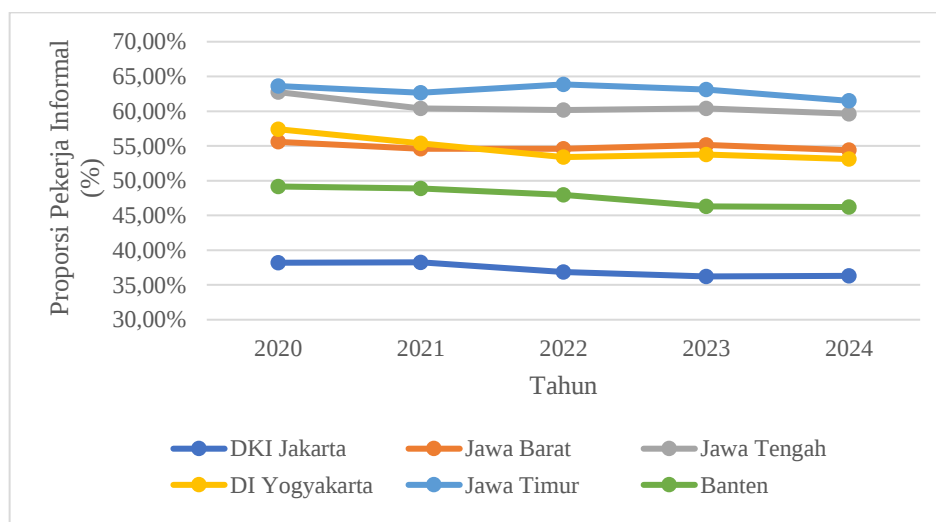
berlangsung secara merata. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu pekerja informal. Sektor informal memiliki peran ganda dalam perekonomian. Di satu sisi, sektor ini menjadi wadah bagi tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal, sehingga berfungsi sebagai alternatif sumber penghidupan. Melalui penyediaan kesempatan kerja sektor informal berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, sektor informal dapat meningkatkan kemiskinan, yang tercermin dari adanya kesenjangan dan ketimpangan sosial akibat rendahnya upah yang diterima oleh pekerja di sektor tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian pekerja informal tetap berada pada tingkat kesejahteraan rendah, sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan, terutama ketika pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak (Supraja & Artosa, 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik (2025c) Pulau Jawa secara konsisten menjadi wilayah dengan persentase pekerja informal terbesar dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia periode 2020-2024. Puncak pekerja informal di Pulau Jawa terjadi pada tahun 2024, yaitu mencapai 54,61% dari total nasional. Sedangkan, jumlah pekerja informal terendah tercatat pada tahun 2021 sebesar 53,86% dari total nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja informal di Pulau Jawa mencakup sekitar setengah dari keseluruhan pekerja informal di Indonesia. Fenomena tersebut terjadi karena Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi nasional, sehingga menarik banyak tenaga kerja dari luar wilayah untuk datang

mencari pekerjaan dengan harapan memperoleh pendapatan yang lebih baik dibandingkan di daerah asalnya (Satriawan, 2022).

Berikut disajikan diagram pekerja informal menurut provinsi di Pulau Jawa:



Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik 2025 (diolah kembali)

Gambar 1. 4

Proporsi Pekerja Informal Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (%)

Berdasarkan diagram tersebut, persentase pekerja informal di beberapa provinsi Pulau Jawa dari tahun 2020-2024, masih mendominasi total penduduk bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor formal belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja. Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki persentase pekerja informal di atas 50%. Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk usia kerja terus mendorong peningkatan angkatan kerja. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan jumlah pekerja informal. Permasalahan

lainnya adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang sebagian besar masih didominasi oleh individu dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Hal ini menciptakan tantangan dalam memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. Selain itu, terdapat penduduk usia sekolah yang memasuki angkatan kerja dengan keterampilan yang tidak cukup untuk bersaing, dan terdapat ketidaksesuaian antara pendidikan dan persyaratan pasar kerja. Kesenjangan ini mengakibatkan meningkatkan pekerja informal, yang berpotensi meningkatkan kemiskinan (Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025).

Sementara itu, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta selama periode 2020-2024, memiliki persentase pekerja informal di bawah 50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persentase pekerja informal lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Tingginya proporsi pekerja formal dipengaruhi oleh besarnya penyerapan tenaga kerja formal di wilayah perkotaan akibat perkembangan sektor industri. Pertumbuhan sektor industri mendorong terciptanya lapangan kerja formal sehingga jumlah pekerja informal menjadi lebih rendah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2024; Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025b).

Fenomena tingginya persentase pekerja informal yang berada di atas 50% diikuti oleh tingkat kemiskinan yang relatif tinggi pada beberapa provinsi. Seperti, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki persentase pekerja informal tertinggi berada pada

tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Dengan demikian, terdapat dugaan adanya hubungan searah antara tingginya pekerja informal yang berpotensi mendorong kenaikan kemiskinan.

Kondisi ini sejalan dengan teori dualisme ekonomi yang dikemukakan oleh Lewis menyatakan bahwa keberadaan sektor informal sebagai konsekuensi dari kapasitas penyerapan tenaga kerja yang terbatas di sektor formal. Teori ini menjelaskan bahwa sektor informal memiliki produktivitas dan tingkat upah yang rendah, tetapi menjadi tempat penampungan bagi tenaga kerja yang tidak memperoleh kesempatan bekerja di sektor formal. Seiring meningkatnya biaya hidup, kenaikan upah di sektor informal sering kali tidak cukup untuk tenaga kerja di sektor informal keluar dari kemiskinan (Perseveranda, 2025).

Kemudian, faktor yang berpengaruh lainnya adalah ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan rasio gini, dengan skala nilai dari nol sampai satu. Rasio gini yang mendekati satu menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata, sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan (Safitri & Susilo, 2024).

Menurut Badan Pusat Statistik (2025b) Pulau Jawa tercatat sebagai wilayah dengan rasio gini tertinggi dibandingkan pulau lainnya di Indonesia, serta secara konsisten berada di atas rasio gini nasional tahun 2020-2024. Rasio gini tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2023, yaitu sebesar 0,405, dengan rasio gini nasional sebesar 0,388. Sedangkan, nilai terendah di Pulau Jawa terjadi pada tahun 2020 yaitu rasio gini sebesar 0,388, dengan rasio gini nasional sebesar 0,381. Sementara itu, pada periode terbaru tahun 2024 sebesar 0,395, dengan rasio gini nasional sebesar 0,379. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasio gini Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan

dengan rasio gini nasional. Hal ini sejalan dengan teori Kuznets, yaitu suatu wilayah yang mengalami ketimpangan pendapatan yang tinggi yang berpotensi meningkatkan kemiskinan. Namun, seiring perkembangan suatu wilayah menjadi daerah yang maju. Maka, ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan dan kemiskinan cenderung menurun (Amalia dkk., 2024).

Rasio gini di Pulau Jawa tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rasio gini nasional. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan fakta bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang ditunjukkan oleh kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Perbedaan karakteristik antar daerah memberikan peluang untuk mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi terhadap satu kawasan atau bergantung pada satu sektor saja. Fokus daerah yang masih tertinggal akan terjadi pemerataan pembangunan pendapatan yang adil, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan (Crismestika & Parianom, 2025).

Kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin semakin melebar karena peningkatan pendapatan kelompok berpenghasilan tinggi berlangsung jauh lebih cepat, sedangkan peningkatan pendapatan kelompok menengah dan bawah mengalami perlambatan. Situasi tersebut mencerminkan perbedaan kemampuan ekonomi antar lapisan masyarakat, yang dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan serta berpotensi meningkatkan kemiskinan (Farhan & Sugianto, 2022).

Faktor lain yang turut memengaruhi kemiskinan adalah laju pertumbuhan penduduk. Menurut Todaro dan Smith menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah

selama periode tahunan. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi (Putri & Yefriza, 2025). Menurut Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang meningkat dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga berpotensi mempertahankan masyarakat dalam lingkaran kemiskinan (Amalia dkk., 2024).

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berdampak negatif maupun positif terhadap tingkat kemiskinan, tergantung pada perencanaan jangka panjang dan faktor pendukung lainnya. Peningkatan pertumbuhan penduduk dapat menurunkan kemiskinan dengan menyediakan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak. Sebaliknya, jika pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan dukungan pendidikan dan kesempatan kerja yang memadai, lulusan dengan sumber daya manusia yang kurang berkualitas akan kesulitan bersaing di pasar tenaga kerja, sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan (Perkasa & Siregar, 2024).

Menurut Badan Pusat Statistik (2025a) laju pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 0,95% menjadi 1,15%. Kemudian, penurunan terjadi dari tahun 2022-2024 sebesar 1,09% menjadi 0,83%.

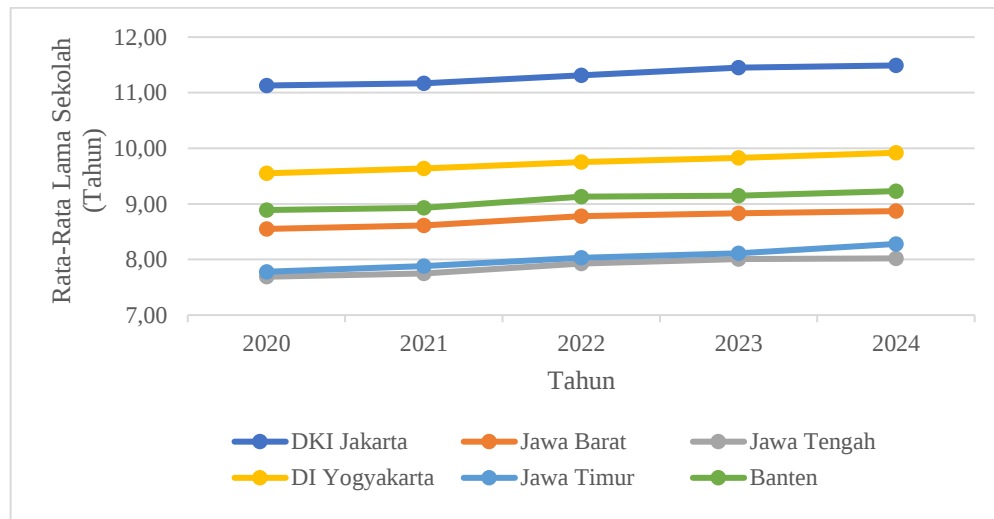
Pada tahun 2020-2021, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan peningkatan. Kondisi ini dipengaruhi oleh situasi pascapandemi yang berdampak pada perubahan angka kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk (Prayogi dkk., 2025). Pada periode 2022-2025, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan kecenderungan menurun seiring berkurangnya angka kelahiran. Penurunan ini merupakan konsekuensi dari berbagai faktor yang berkaitan, seperti meningkatnya

pendidikan dan partisipasi kerja perempuan, urbanisasi, pergeseran nilai budaya, mahal nya biaya hidup dan pendidikan anak, serta semakin luasnya akses terhadap layanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Di satu sisi, tren tersebut mencerminkan kemajuan dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup. Namun di sisi lain, kondisi ini berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang, seperti tidak optimalnya pemanfaatan bonus demografi, ketidakseimbangan struktur usia penduduk, serta kemungkinan munculnya kekurangan tenaga kerja pada masa mendatang (Fieldo dkk., 2025).

Selain itu, kemiskinan juga dipengaruhi oleh pendidikan. Todaro dan Smith berpendapat bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang dapat memberikan peningkatan produktivitas kerja dan membuka akses untuk peluang kerja yang lebih baik. Dengan demikian, individu dengan rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi, cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk memutus lingkaran kemiskinan (Sagita dkk., 2025).

Dalam teori modal manusia oleh Theodore Schultz dan Gary Becker menjelaskan bahwa pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi pada modal manusia yang meningkatkan kemampuan dan produktivitas individu, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan yang berperan dalam menekan tingkat kemiskinan (Fitriyanto, 2024).

Diagram di bawah ini memperlihatkan rata-rata lama sekolah di Pulau Jawa, sebagai berikut:



Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik 2025 (diolah kembali)

Gambar 1. 5

**Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024
(Tahun)**

Berdasarkan diagram yang tersaji bahwa semua provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun 2020-2024. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta yang mengalami peningkatan sebesar 11,13 menjadi 11,49. Kemudian, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meningkat sebesar 9,55 menjadi 9,92. Selanjutnya, Provinsi Banten dengan peningkatan sebesar 8,89 menjadi 9,23. Kemudian, Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 8,89 menjadi 9,23. Kemudian, Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 8,89 menjadi 9,23. Kemudian, Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 8,89 menjadi 9,23. Selanjutnya, Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 8,89 menjadi 9,23. Selanjutnya, Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 8,89 menjadi 9,23. Sementara itu, posisi terendah berada di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 7,69 menjadi 8,02.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan tingkat pendidikan antar provinsi di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta mencatat rata-rata lama sekolah tertinggi sehingga menunjukkan dominasi capaian pendidikan dibandingkan provinsi lain yang selisih angkanya relatif tidak terlalu jauh.

Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya wilayah yang mengelola seluruh jenjang pendidikan pada tingkat provinsi. Berbeda dengan daerah lain, pengelolaan pendidikan dasar umumnya berada di tingkat kabupaten/kota, sedangkan pendidikan menengah di tingkat provinsi. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan di DKI Jakarta tergolong lebih besar dibandingkan provinsi lainnya, yang berkontribusi pada tingginya rata-rata lama sekolah. Meski demikian, pemerintah provinsi tersebut masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan mutu pendidikan antar sekolah (Nurfakihiswara dkk., 2024).

Setiap provinsi di Pulau Jawa memiliki rata-rata lama sekolah yang berbeda dari tahun 2020-2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan antarwilayah dan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang layak, masih menjadi isu yang harus diperhatikan dan perlu tindakan perbaikan. Meningkatkan akses pendidikan merupakan strategi penting untuk pengentasan kemiskinan. Serta, pendidikan menjadi peran penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang akhirnya akan mengarah pada pengurangan kemiskinan (Safitri & Susilo, 2024).

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang mengkaji secara parsial pengaruh pekerja informal, ketimpangan pendapatan, laju pertumbuhan penduduk, dan pendidikan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh masih beragam dan belum menunjukkan konsistensi yang jelas.

Penelitian oleh Aulia & Dewi (2025) dan Suratini dkk. (2025) Sihotang dkk. (2023) menyatakan bahwa pekerja informal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, penelitian oleh Kinanti dkk. (2019) menunjukkan bahwa pekerja informal positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian oleh Damanik & Zebua (2025) dan Kewa & Ronaldias (2025) menyatakan bahwa jenis kelamin di sektor informal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga. Di sisi lain, pekerja informal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan (Etefa, 2023; Ramasimu dkk., 2023; Sharma & Adhikari, 2020). Penelitian mengenai pengaruh pekerja informal terhadap kemiskinan, umumnya menerapkan pendekatan kualitatif dan metode wawancara dibandingkan regresi data panel.

Penelitian oleh Nabila dkk. (2026), Mustikaningrum & Utomo (2025), dan Endrawati dkk. (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Saerendra dkk. (2025), Anggraini (2024), dan Manullang dkk. (2024) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan (Dewi & Nursiyono, 2023; Putra & Robertus, 2024; Safitri & Gunarto, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Puteri & Suasih (2025), Yanti dkk. (2024), dan Praja dkk. (2023) menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, temuan oleh, Marwatika & Setyowati (2025), Epinda & Sinaga (2023) dan Fauzi dkk. (2022) menunjukkan

bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan (Langoday & Man, 2024; Satria dkk., 2024; Siburian dkk., 2024). Sedangkan, Paridah & Pahlevi (2025), Sadiyah dkk. (2025), dan Juliana dkk. (2023) menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahtia dkk. (2025), Rahim dkk. (2024), dan Permata & Indraswanti (2023) menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, temuan oleh Manengal dkk. (2025), Hani & Imaningsih (2024), dan Thalib dkk. (2023) menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Di sisi lain, penelitian oleh Utami & Faizin (2025), Imah dkk. (2024), Khoirudin & Haerusman (2023) menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, temuan oleh Purwanti dkk. (2025), Winarni dkk. (2024), dan Soliha (2023) menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, pengurangan kemiskinan perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka peneliti tertarik untuk membahas hal ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Pekerja Informal, Ketimpangan Pendapatan, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2016-2024.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh pekerja informal, ketimpangan pendapatan, laju pertumbuhan penduduk, dan pendidikan secara parsial terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2016-2024?
2. Bagaimana pengaruh pekerja informal, ketimpangan pendapatan, laju pertumbuhan penduduk, dan pendidikan secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2016-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pekerja informal, ketimpangan pendapatan, laju pertumbuhan penduduk, dan pendidikan secara parsial terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2016-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh pekerja informal, ketimpangan pendapatan, laju pertumbuhan penduduk, dan pendidikan secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2016-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis parsial pekerja informal terhadap kemiskinan, yang masih relatif terbatas untuk diteliti. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan variabel pekerja informal, ketimpangan pendapatan, laju pertumbuhan penduduk, dan pendidikan dalam menganalisis pengaruh terhadap kemiskinan, dengan menggunakan data terbaru yaitu tahun 2016-2024. Oleh karena itu, dapat menjadi bahan kajian atau perbandingan dengan peneliti lainnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dan referensi untuk menentukan kebijakan dalam mengendalikan pekerja informal, ketimpangan pendapatan, laju pertumbuhan penduduk, dan pendidikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Sehingga, dapat menjadi acuan untuk implementasi kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan di Pulau Jawa.

1.5 Lokasi dan Jadwal

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pulau Jawa, melalui pengambilan data dari situs Badan Pusat Statistik.

Tabel 1. 1
Jadwal Penelitian

[illegible]

